

Received: 6 October 2025
Accepted: 19 December 2025
Published: 30 December 2025

DIPLOMASI PUBLIK DAN POLITIK GENDER DI GLOBAL SELATAN: MENGGUGAT NETRALITAS REPRESENTASI DI INDONESIA, AFRIKA SELATAN, DAN BRASIL

Roy Setiawan

Universitas Sriwijaya

roysetiawan@fisip.unsri.ac.id

I Kadek Andre Nuaba

Universitas Sriwijaya

kadekandreanuaba@fisip.unsri.ac.id

Abstract

Public diplomacy is often understood as a strategic communication practice that is neutral and universal. However, in the context of Global South countries, this presumed neutrality deserves to be challenged, as it tends to overlook the gendered dimensions embedded in the construction of national image and international legitimacy. This study examines how Indonesia, South Africa, and Brazil represent gender within their public diplomacy strategies, and how these practices reflect or contest global power relations. Employing feminist constructivism and postcolonial feminism as analytical frameworks, the research analyzes policy documents, digital campaigns, and official media narratives. The novelty of this study lies in its integration of gender analysis and epistemic justice within the field of public diplomacy in Global South contexts—an area often marginalized in mainstream international relations literature. The research not only reveals the symbolic and depoliticized representations of gender in public diplomacy, but also highlights resistant practices by non-state actors who reimagine diplomacy in more inclusive terms. It argues that gender-based public diplomacy is not merely about image-making, but about a state's willingness to confront its own social complexities and build legitimacy through more just and reflective narratives.

Keywords: *Public Diplomacy, Gender Politics, Gender Representation, Global South, Epistemic Justice*

Abstrak

Diplomasi publik sering dipahami sebagai praktik komunikasi strategis yang netral dan universal. Namun, dalam konteks negara-negara Global Selatan, netralitas ini patut digugat karena mengabaikan dimensi gender yang melekat dalam konstruksi citra dan legitimasi internasional. Penelitian ini mengkaji bagaimana Indonesia, Afrika Selatan, dan Brasil merepresentasikan gender dalam strategi diplomasi publik mereka, serta bagaimana praktik tersebut mencerminkan atau menantang relasi kuasa global. Dengan menggunakan pendekatan *feminist constructivism* dan *postcolonial feminism*, analisis dilakukan terhadap dokumen kebijakan, kampanye digital, dan narasi media resmi. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis gender dan keadilan epistemik dalam studi diplomasi publik negara-negara Global Selatan, yang selama ini cenderung terpinggirkan dalam literatur hubungan internasional arus utama. Penelitian ini tidak hanya mengungkap representasi

simbolik gender dalam diplomasi publik, tetapi juga menyoroti praktik resistensi dari aktor non-negara yang mendorong reimajinasi diplomasi publik secara lebih inklusif. Penelitian ini berargumen bahwa diplomasi publik berbasis gender bukan hanya soal citra, tetapi juga tentang keberanian negara untuk mengakui kompleksitas sosialnya sendiri dan membangun legitimasi melalui narasi yang lebih adil.

Kata kunci: Diplomasi Publik, Politik Gender, Representasi Gender, Global Selatan, Keadilan Epistemik

Pendahuluan

Diplomasi publik telah menjadi instrumen penting dalam politik luar negeri kontemporer, digunakan oleh negara untuk membentuk citra, membangun legitimasi, dan memengaruhi opini publik internasional. Dalam literatur hubungan internasional arus utama, praktik ini sering dipahami sebagai bentuk komunikasi strategis yang netral dan universal, seolah-olah bebas dari bias ideologis maupun struktur kekuasaan (Nye, 2004). Namun, pemahaman ini semakin dipertanyakan, terutama ketika praktik diplomasi publik dianalisis dari perspektif gender dan dalam konteks negara-negara Global Selatan.

Kritik feminis terhadap hubungan internasional telah lama menyoroti absennya analisis gender dalam studi kebijakan luar negeri dan diplomasi (Enloe, 2014; Tickner, 1992). Gender bukan hanya soal representasi perempuan dalam struktur diplomatik, tetapi juga menyangkut bagaimana maskulinitas dan feminitas dikonstruksi dalam narasi negara, serta bagaimana identitas tersebut digunakan untuk membentuk legitimasi internasional. Dalam praktik diplomasi publik, representasi gender dapat berfungsi sebagai alat untuk membangun citra negara yang progresif, humanis, atau berkomitmen terhadap nilai-nilai kesetaraan. Namun,

representasi ini sering kali bersifat simbolik dan depolitisasi, tidak mencerminkan perubahan struktural yang nyata dalam kebijakan luar negeri (UN Women, 2023).

Negara-negara Global Selatan menghadapi tantangan yang khas dalam praktik diplomasi publik. Di satu sisi, mereka berupaya membangun citra yang kompetitif di panggung internasional, terutama dalam menghadapi dominasi narasi dari negara-negara Global Utara. Di sisi lain, mereka harus berhadapan dengan warisan kolonial, ketimpangan struktural, dan tuntutan representasi yang lebih adil dari komunitas global. Dalam konteks ini, gender menjadi medan negosiasi yang penting. Representasi perempuan dan isu-isu gender dalam diplomasi publik bukan hanya soal estetika, tetapi juga menyangkut siapa yang memiliki suara, siapa yang diwakili, dan bagaimana negara membangun legitimasi melalui narasi yang dipilih (Meredith, 2024; Sukma, 2011).

Studi tentang diplomasi publik berbasis gender masih relatif terbatas, terutama dalam konteks Global Selatan. Sebagian besar literatur tentang *feminist foreign policy* (FFP) berasal dari negara-negara Global Utara seperti Swedia, Kanada, dan Jerman, yang telah secara eksplisit mengadopsi pendekatan feminis dalam kebijakan luar negeri mereka (UN

Women, 2023). Pendekatan ini menekankan prinsip “*Rights, Resources, Representation*” sebagai kerangka kerja untuk mengintegrasikan nilai-nilai feminis ke dalam diplomasi dan kebijakan internasional. Namun, dalam konteks Global Selatan, pendekatan feminis terhadap diplomasi publik sering kali muncul dalam bentuk praktik resistensi dari aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil, komunitas adat, dan gerakan perempuan lokal (Khullar, 2023).

Selain itu, pendekatan feminis dalam diplomasi publik di Global Selatan tidak selalu bersifat institusional. Banyak negara menghadapi keterbatasan struktural dan politik yang membuat adopsi kebijakan feminis secara eksplisit menjadi sulit. Oleh karena itu, praktik diplomasi publik yang berperspektif gender sering kali muncul dalam bentuk narasi alternatif, kampanye budaya, atau diplomasi komunitas yang tidak selalu diakui secara resmi oleh negara. Praktik ini mencerminkan dinamika epistemik yang kompleks, di mana aktor-aktor lokal berupaya membangun legitimasi melalui cara-cara yang tidak konvensional (Rodrigues & Maciel, 2023).

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji bagaimana Indonesia, Afrika Selatan, dan Brasil merepresentasikan gender dalam

strategi diplomasi publik mereka. Ketiga negara ini dipilih karena memiliki sejarah politik yang kompleks, komitmen terhadap isu kesetaraan, dan praktik diplomasi publik yang aktif di tingkat regional maupun global. Indonesia, misalnya, telah menunjukkan minat strategis dalam memperluas pengaruhnya melalui diplomasi budaya dan keanggotaan dalam forum multilateral seperti BRICS. Namun, representasi gender dalam diplomasi publik Indonesia masih cenderung bersifat simbolik, dengan perempuan sering ditampilkan sebagai ikon budaya atau agen moral, bukan sebagai aktor strategis dalam kebijakan luar negeri (Sukma, 2011).

Afrika Selatan, sebagai negara yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip kesetaraan dalam konstitusinya, memiliki sejarah panjang dalam diplomasi berbasis hak asasi manusia. Praktik diplomasi publiknya sering kali menampilkan narasi tentang perjuangan anti-apartheid, keadilan sosial, dan inklusivitas. Namun, seperti halnya Indonesia, representasi gender dalam diplomasi publik Afrika Selatan juga menghadapi tantangan dalam menghindari depolitisasi dan tokenisme (Ayodele et al., 2021). Di sisi lain, Brasil menunjukkan dinamika yang menarik dalam diplomasi publiknya, terutama melalui kampanye budaya dan pendidikan yang melibatkan

perempuan adat dan komunitas lokal. Praktik ini membuka ruang bagi reimajinasi diplomasi publik yang lebih reflektif dan inklusif, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka kebijakan resmi (Rodrigues & Maciel, 2023).

Dengan menggunakan pendekatan *feminist constructivism* dan *postcolonial feminism*, penelitian ini menganalisis dokumen kebijakan, kampanye digital, dan narasi media resmi dari ketiga negara tersebut. *Feminist constructivism* memungkinkan pembacaan terhadap bagaimana negara membentuk dan dibentuk oleh norma gender dalam praktik diplomasi publik (Aggestam & Towns, 2018). Sementara itu, *postcolonial feminism* memberikan kerangka untuk memahami bagaimana identitas gender di Global Selatan dipengaruhi oleh sejarah kolonialisme, rasialisasi, dan marginalisasi epistemic (Meredith, 2024; Santos, 2018). Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam mengungkap dinamika representasi dan resistensi dalam diplomasi publik berbasis gender.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis gender dan keadilan epistemic dalam studi diplomasi publik negara-negara Global Selatan, yang selama ini cenderung terpinggirkan dalam literatur hubungan internasional arus utama.

Penelitian ini tidak hanya mengungkap representasi simbolik gender dalam diplomasi publik, tetapi juga menyoroti praktik resistensi dari aktor non-negara yang mendorong reimajinasi diplomasi publik secara lebih inklusif. Dengan demikian, diplomasi publik berbasis gender dipahami bukan sekadar sebagai strategi komunikasi, melainkan sebagai arena politik representasi yang menentukan posisi negara dalam lanskap global yang terus berubah. Lebih jauh, penelitian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan kerangka evaluasi diplomasi publik yang lebih sensitif terhadap isu gender dan keadilan sosial. Dalam konteks implementasi Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), diplomasi publik memiliki peran penting dalam menyampaikan komitmen negara terhadap kesetaraan dan inklusivitas. Namun, komitmen ini harus dibarengi dengan refleksi kritis terhadap bagaimana narasi gender dibentuk, siapa yang diwakili, dan bagaimana suara-suara marginal diberi ruang dalam diplomasi internasional (Khullar, 2023; UN Women, 2023).

Akhirnya, penting untuk menyoroti bahwa diplomasi publik bukanlah praktik yang statis. Ia terus berkembang seiring perubahan teknologi, geopolitik, dan tuntutan masyarakat sipil. Dalam era

digital, diplomasi publik juga mengalami transformasi melalui media sosial, platform virtual, dan kampanye daring yang memungkinkan aktor non-negara untuk turut serta dalam membentuk narasi global. Dalam konteks ini, representasi gender menjadi semakin kompleks, karena citra dan pesan negara tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh institusi resmi, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika komunikasi transnasional (Aggestam & Towns, 2018; Ayodele et al., 2021). Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami diplomasi publik sebagai ruang kontestasi identitas dan legitimasi. Melalui studi kasus Indonesia, Afrika Selatan, dan Brasil, kajian ini menunjukkan bahwa negara-negara Global Selatan memiliki peluang strategis untuk membangun diplomasi publik yang lebih adil, reflektif, dan transformatif—dengan menjadikan gender bukan sebagai citra, tetapi sebagai komitmen politik yang nyata.

Kerangka Teori

Diplomasi publik telah lama dipahami sebagai instrumen strategis dalam politik luar negeri, terutama dalam membentuk citra dan legitimasi negara di mata komunitas internasional. Konsep ini berakar pada gagasan *soft power* yang

dikembangkan oleh Nye (2004), yaitu kemampuan negara untuk memengaruhi aktor lain melalui daya tarik budaya, nilai, dan kebijakan, bukan melalui paksaan. Namun, pendekatan konvensional terhadap diplomasi publik sering kali mengabaikan dimensi sosial-politik yang melekat dalam praktik komunikasi antarnegara, khususnya aspek gender dan relasi kuasa global. Dalam literatur hubungan internasional arus utama, negara sering diposisikan sebagai aktor rasional dan netral. Kritik feminis terhadap paradigma ini menyoroti bagaimana relasi internasional dibentuk oleh struktur patriarki dan maskulinitas negara (Tickner, 1992). Enloe (2014) menekankan bahwa untuk memahami politik global secara utuh, kita harus “menanyakan di mana perempuan berada” dalam setiap proses diplomatik dan kebijakan luar negeri. Gender bukan hanya soal representasi perempuan, tetapi juga menyangkut bagaimana identitas gender dikonstruksi, digunakan, dan dinegosiasikan dalam narasi negara.

Untuk memahami dinamika ini, penelitian ini menggunakan dua pendekatan teoritis utama: *feminist constructivism* dan *postcolonial feminism*. *Feminist constructivism* berangkat dari asumsi bahwa identitas dan norma sosial dibentuk melalui interaksi dan konstruksi

sosial, termasuk dalam praktik diplomasi. Locher dan Prügl (2001) menunjukkan bahwa meskipun feminisme dan konstruktivisme berasal dari tradisi epistemologis yang berbeda, keduanya dapat saling melengkapi dalam menganalisis bagaimana norma gender dibentuk dan dipertahankan dalam institusi internasional. Dalam kerangka ini, diplomasi publik dipahami sebagai arena di mana negara membentuk citra gendernya sendiri, baik untuk konsumsi domestik maupun internasional.

Postcolonial feminism, di sisi lain, memberikan lensa kritis untuk membaca bagaimana identitas gender di Global Selatan dipengaruhi oleh sejarah kolonialisme, rasialisasi, dan marginalisasi epistemik. Strazzeri (2024) menekankan bahwa *postcolonial feminism* tidak hanya mengkritisi dominasi Barat dalam produksi pengetahuan, tetapi juga menyoroti bagaimana perempuan di Global Selatan sering kali direduksi menjadi objek representasi, bukan subjek politik. Santos (2018) mengusulkan konsep “epistemologi Selatan” sebagai cara untuk mengakui dan memulihkan pengetahuan yang selama ini terpinggirkan oleh dominasi Barat. Dalam diplomasi publik, hal ini berarti mengkritisi narasi universal yang sering kali mengabaikan konteks lokal, serta

mendorong negara-negara Global Selatan untuk membangun narasi yang lebih reflektif terhadap kompleksitas sosial mereka sendiri. Meredith (2024) menambahkan bahwa keadilan epistemik bukan hanya soal siapa yang berbicara, tetapi juga bagaimana pengetahuan diproduksi dan diakui dalam ruang global. Dalam diplomasi publik, ini berarti memberi ruang bagi aktor-aktor lokal, termasuk perempuan dan komunitas adat, untuk turut serta dalam membentuk citra dan legitimasi negara. Pendekatan ini menantang asumsi bahwa diplomasi publik adalah domain eksklusif negara dan membuka kemungkinan bagi diplomasi yang lebih partisipatif dan inklusif. Dalam konteks diplomasi publik berbasis gender, Aggestam dan Towns (2019) mengusulkan agenda penelitian baru yang menyoroti “*gender turn*” dalam diplomasi. Mereka menunjukkan bahwa diplomasi tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai praktik elite maskulin, tetapi sebagai ruang yang diperebutkan oleh berbagai aktor dengan identitas dan kepentingan yang beragam. Stephenson dan Rathore (2025) memperluas gagasan ini dengan menekankan pentingnya inovasi dan refleksi kritis dalam studi diplomasi berbasis gender, terutama dalam konteks Global Selatan yang sering kali diabaikan dalam literatur arus utama.

Dalam praktiknya, negara-negara Global Selatan menghadapi tantangan struktural dan politik dalam mengintegrasikan perspektif feminis ke dalam diplomasi publik. Angelini (2024), dalam analisis terhadap kebijakan luar negeri feminis di Kanada, Spanyol, dan Jerman, menunjukkan bahwa bahkan negara-negara Global Utara pun masih bergulat dengan ketegangan antara retorika kesetaraan dan praktik diplomatik yang eksklusif. Dalam konteks Global Selatan, pendekatan feminis terhadap diplomasi publik sering kali muncul dari masyarakat sipil, bukan dari negara (Khullar, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi publik berbasis gender tidak selalu bersifat top-down, tetapi juga dapat muncul sebagai praktik resistensi dari bawah. Dalam era digital, diplomasi publik juga mengalami transformasi melalui media sosial, platform virtual, dan kampanye daring yang memungkinkan aktor non-negara untuk turut serta dalam membentuk narasi global. Ayodele et al. (2021) mencatat bahwa diplomasi digital di Afrika menunjukkan potensi besar dalam memperluas partisipasi dan representasi, meskipun tantangan tokenisme dan eksklusi tetap ada. Dalam konteks ini, representasi gender menjadi semakin kompleks, karena citra dan pesan negara tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh institusi resmi, melainkan juga

dipengaruhi oleh dinamika komunikasi transnasional. Dengan menggabungkan *feminist constructivism* dan *postcolonial feminism*, penelitian ini membangun kerangka analisis yang mampu membaca praktik diplomasi publik secara lebih kompleks. Diplomasi publik tidak hanya dilihat sebagai strategi komunikasi, tetapi sebagai ruang kontestasi identitas, representasi, dan legitimasi. Gender menjadi titik masuk untuk memahami bagaimana negara-negara Global Selatan membangun citra, merespons tekanan global, dan menegosiasikan posisi mereka dalam lanskap internasional yang terus berubah.

Kerangka teori ini juga memungkinkan analisis terhadap praktik resistensi yang muncul dari aktor non-negara. Dalam konteks Indonesia, Sukma (2011) menunjukkan bahwa diplomasi budaya telah menjadi strategi utama dalam membangun citra internasional. Namun, representasi gender dalam diplomasi publik Indonesia masih cenderung bersifat estetis dan tidak terintegrasi dalam kebijakan luar negeri secara substantif. Perempuan sering ditampilkan sebagai penari, pembawa batik, atau simbol kelembutan, tetapi jarang sebagai diplomat, negosiator, atau pembuat kebijakan. Dengan demikian, kerangka teori ini tidak hanya relevan untuk

memahami representasi gender dalam diplomasi publik, tetapi juga untuk mengkaji bagaimana negara-negara Global Selatan dapat membangun legitimasi melalui narasi yang lebih adil dan partisipatif. Penelitian ini berargumen bahwa diplomasi publik berbasis gender bukan hanya soal citra, tetapi tentang keberanian negara untuk mengakui kompleksitas sosialnya sendiri dan membangun hubungan internasional yang lebih setara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif untuk menganalisis bagaimana negara-negara Global Selatan—khususnya Indonesia, Afrika Selatan, dan Brasil—merekonstruksi dan merepresentasikan gender dalam praktik diplomasi publik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika wacana, simbol, dan strategi komunikasi negara yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif. Fokus utama penelitian ini adalah pada konstruksi identitas gender dalam narasi diplomatik, serta bagaimana praktik tersebut mencerminkan atau menantang relasi kuasa global. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus komparatif. Indonesia, Afrika

Selatan, dan Brasil dipilih sebagai kasus karena masing-masing memiliki karakteristik yang memungkinkan analisis lintas konteks. Ketiga negara ini memiliki sejarah politik yang kompleks, aktif dalam diplomasi publik regional dan global, serta menunjukkan dinamika representasi gender yang berbeda. Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami secara kontekstual praktik diplomasi publik berbasis gender, serta mengidentifikasi pola dan perbedaan yang signifikan antar negara (Yin, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori utama: dokumen kebijakan resmi, kampanye diplomasi digital dan budaya, serta publikasi dari aktor non-negara. Dokumen kebijakan mencakup strategi diplomasi publik, laporan kementerian luar negeri, dan pernyataan resmi pemerintah terkait representasi gender. Kampanye digital dianalisis melalui situs web diplomatik, media sosial resmi, dan materi promosi internasional yang menampilkan citra perempuan atau narasi gender. Sementara itu, publikasi dari aktor non-negara mencakup laporan organisasi masyarakat sipil, komunitas adat, dan gerakan perempuan yang terlibat dalam diplomasi komunitas atau advokasi internasional. Untuk menganalisis data tersebut,

penelitian ini menggunakan teknik analisis wacana kritis (AWK). Teknik ini dipilih karena mampu mengungkap bagaimana bahasa dan simbol digunakan untuk membentuk dan mempertahankan relasi kuasa, serta bagaimana identitas gender dikonstruksi dalam konteks diplomatik. Fairclough (2013) menyatakan bahwa analisis wacana kritis bertujuan untuk mengungkap hubungan antara praktik bahasa dan struktur sosial yang lebih luas, termasuk ideologi dan kekuasaan. Dalam konteks ini, pendekatan *What's the Problem Represented to Be?* (WPR) dari Bacchi (2009) digunakan untuk mengidentifikasi asumsi yang mendasari representasi gender dalam kebijakan diplomasi publik. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan terhadap bagaimana masalah gender dikonstruksi dalam dokumen kebijakan dan narasi resmi negara.

Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada pendekatan *feminist critical discourse analysis* (FCDA) yang dikembangkan oleh Lazar (2017), yang menekankan pentingnya membaca wacana sebagai praktik sosial yang bersifat politis dan ideologis. FCDA digunakan untuk menelaah bagaimana representasi perempuan dalam diplomasi publik tidak hanya mencerminkan nilai-nilai budaya,

tetapi juga berfungsi sebagai alat legitimasi negara dalam arena internasional. Wodak (2015) menambahkan bahwa pendekatan historis dalam analisis wacana memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana narasi gender dibentuk secara temporal dan kontekstual, serta bagaimana ia berinteraksi dengan struktur kekuasaan yang lebih luas. Validitas dan keandalan analisis dijaga melalui strategi triangulasi sumber dan perspektif. Data dari dokumen resmi dibandingkan dengan narasi dari aktor non-negara dan analisis media digital. Selain itu, kerangka teoretis digunakan secara konsisten untuk menafsirkan temuan, sehingga analisis tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga kritis dan reflektif. Penelitian ini juga mempertimbangkan konteks lokal dan dinamika politik masing-masing negara, agar interpretasi tidak terjebak dalam generalisasi atau bias universalistik. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap bagaimana diplomasi publik di Global Selatan tidak hanya menjadi alat komunikasi negara, tetapi juga ruang kontestasi identitas dan representasi gender. Metodologi ini mendukung tujuan utama penelitian: menggugat asumsi netralitas dalam diplomasi publik dan mengangkat pentingnya representasi gender yang adil, kontekstual, dan transformatif.

Hasil dan Pembahasan

Representasi Gender dalam Diplomasi Publik

Representasi gender dalam diplomasi publik negara-negara Global Selatan tidak dapat dipisahkan dari konstruksi historis, ideologis, dan institusional yang membentuk praktik komunikasi negara. Dalam konteks Indonesia, Afrika Selatan, dan Brasil, diplomasi publik berbasis gender menunjukkan ketegangan antara citra dan struktur, antara estetika representasi dan partisipasi substantif. Di Indonesia, diplomasi publik kerap mengandalkan kekuatan budaya sebagai medium utama. Perempuan ditampilkan sebagai ikon budaya—penari tradisional, pembawa batik, atau figur keibuan yang merepresentasikan nilai harmoni dan kelembutan. Representasi ini bersifat estetis dan depolitisasi, di mana perempuan hadir sebagai simbol moral dan etika nasional, bukan sebagai aktor strategis dalam diplomasi formal. Dalam kerangka feminist constructivism, hal ini menunjukkan bagaimana norma gender dibentuk dan direproduksi melalui praktik diplomatik yang tampak netral namun sarat dengan ideologi maskulin negara (Aggestam & Towns, 2019; Locher & Prügl, 2001). Data dari Pemilu 2024 menunjukkan bahwa

proporsi perempuan di parlemen Indonesia meningkat menjadi 22,1%, namun sistem pembulatan ke bawah dalam Peraturan KPU No. 10/2023 justru menghambat pemenuhan kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif. Dalam konteks diplomasi, webinar kebijakan yang diselenggarakan oleh (ALMI & CBDS, 2025) mengungkap bahwa peran perempuan dalam diplomasi Indonesia masih terjebak dalam narasi “ibuisme negara”—di mana perempuan diasosiasikan dengan peran pendamping dan simbol moral, bukan sebagai pengambil keputusan. Bahkan kontribusi diplomatik informal seperti peran istri diplomat dan diaspora perempuan belum diakui secara struktural, meskipun mereka memainkan peran penting dalam diplomasi budaya dan ekonomi.

Afrika Selatan menunjukkan dinamika yang lebih progresif secara formal. Negara ini memiliki salah satu tingkat representasi perempuan tertinggi di dunia dalam lembaga legislatif, dengan lebih dari 40% anggota parlemen dan Dewan Nasional Provinsi adalah perempuan. Namun, laporan dari *Commission for Gender Equality* (CGE) menunjukkan bahwa representasi ini belum sepenuhnya tercermin dalam struktur diplomatik dan pengambilan keputusan

kebijakan luar negeri. Kampanye diplomasi digital Afrika Selatan sering menampilkan perempuan sebagai pemimpin dan aktivis, terutama dalam isu perdamaian dan keamanan, sejalan dengan Resolusi PBB 1325. Namun, tantangan tokenisme tetap ada, di mana perempuan ditampilkan sebagai simbol inklusivitas tanpa akses penuh terhadap kekuasaan institusional (Ayodele et al., 2021). Dalam kerangka *postcolonial feminism*, praktik representasi ini mencerminkan upaya negara untuk merebut kembali narasi dari dominasi epistemik Barat, namun masih dibatasi oleh struktur patriarki yang tersisa (Strazzeri, 2024). Representasi perempuan sebagai “wajah inklusivitas” sering kali tidak diikuti oleh pengakuan terhadap peran strategis mereka dalam diplomasi negara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun narasi kesetaraan digunakan sebagai alat diplomasi, transformasi struktural belum sepenuhnya tercapai.

Brasil menghadirkan kompleksitas tersendiri. Meskipun negara ini mulai mendiskusikan kebijakan luar negeri feminis secara eksplisit, data menunjukkan bahwa hanya 23% diplomat aktif adalah perempuan, dan hanya 16% dari posisi kepemimpinan diplomatik (duta besar, konsul, kepala sekretariat) dipegang oleh Perempuan (Rodrigues & Maciel, 2023).

Brasil juga belum pernah menunjuk menteri luar negeri perempuan, menjadikannya satu-satunya negara di Amerika Selatan dengan rekor tersebut. Artikel di *Revista Brasileira de Política Internacional* menyoroti bahwa meskipun ada kemajuan seperti penunjukan wakil menteri perempuan dan pembentukan Asosiasi Diplomat Perempuan Brasil, representasi perempuan dalam diplomasi tetap terbatas dan belum menjadi kebijakan negara yang terstruktur. Namun, Brasil juga menunjukkan praktik diplomasi komunitas yang melibatkan perempuan adat dan aktivis lokal dalam kampanye budaya dan pendidikan internasional. Praktik ini membuka ruang bagi narasi alternatif yang tidak hanya menampilkan perempuan sebagai simbol, tetapi juga sebagai subjek politik yang aktif. Dalam kerangka *feminist critical discourse analysis*, praktik ini dapat dibaca sebagai bentuk “*counter-discourse*” yang menantang narasi dominan negara dan membuka ruang bagi representasi yang lebih reflektif dan kontekstual (Lazar, 2017; Wodak, 2015).

Ketiga studi kasus menunjukkan bahwa diplomasi publik berbasis gender di Global Selatan masih didominasi oleh simbolisme dan estetika, dengan absensi struktural yang signifikan. Representasi perempuan sebagai citra budaya tidak

diimbangi dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan diplomatik. Dalam konteks ini, representasi gender berfungsi lebih sebagai alat soft power daripada sebagai refleksi dari transformasi politik yang substantif. *Feminist constructivism* membantu mengungkap bagaimana negara membentuk citra gendernya untuk konsumsi internasional, sementara *postcolonial feminism* menyoroti bagaimana representasi ini sering kali mengabaikan kompleksitas sosial dan sejarah lokal (Santos, 2018).

Praktik Resistensi dan Reimajinasi

Di tengah dominasi narasi diplomasi publik yang dikendalikan oleh negara, muncul praktik resistensi dan reimajinasi dari aktor-aktor non-negara yang berupaya membentuk narasi alternatif tentang gender dan representasi. Praktik ini tidak hanya menantang struktur diplomatik formal yang maskulin dan hierarkis, tetapi juga membuka ruang bagi epistemologi lokal dan pengalaman perempuan yang selama ini terpinggirkan dalam diplomasi resmi. Di Brasil, diplomasi komunitas yang melibatkan perempuan adat dan aktivis lokal menjadi contoh nyata dari reimajinasi diplomasi publik berbasis gender. Kampanye budaya dan pendidikan internasional yang dijalankan oleh komunitas seperti *Rede de Mulheres*

Indigenas do Brasil tidak hanya menampilkan perempuan sebagai simbol warisan budaya, tetapi juga sebagai subjek politik yang aktif dalam advokasi hak atas tanah, identitas, dan keadilan sosial. (Rodrigues & Maciel, 2023) mencatat bahwa keterlibatan perempuan adat dalam diplomasi komunitas mencerminkan dinamika resistensi terhadap struktur diplomatik formal yang eksklusif, serta membuka ruang bagi narasi yang lebih reflektif dan kontekstual. Spies (2019) menekankan bahwa diplomasi di Global Selatan tidak dapat dipisahkan dari praktik komunitas yang sering kali lebih responsif terhadap kebutuhan lokal daripada diplomasi negara yang bersifat elitis. Namun, keterlibatan ini belum sepenuhnya diakui dalam kebijakan resmi negara. Diplomasi komunitas sering berjalan paralel dengan diplomasi negara, tanpa integrasi yang jelas. Dalam kerangka *feminist critical discourse analysis*, seperti yang dijelaskan oleh Lazar (2017), praktik ini dapat dibaca sebagai bentuk “counter-discourse” yang menantang narasi dominan negara dan memperluas definisi diplomasi publik sebagai ruang kontestasi identitas dan legitimasi.

Afrika Selatan menunjukkan praktik resistensi yang lebih terstruktur melalui organisasi masyarakat sipil dan

gerakan perempuan yang aktif dalam diplomasi digital. Kampanye seperti *#SheLeadsAfrica* dan *#AfricanFeministDiplomacy* menggunakan media sosial untuk menyuarakan isu-isu gender yang tidak diangkat oleh negara, seperti kekerasan berbasis gender, akses terhadap pendidikan, dan partisipasi perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Ayodele et al. (2021) menunjukkan bahwa diplomasi digital Afrika Selatan membuka ruang bagi representasi yang lebih beragam, meskipun tantangan dalam menghindari tokenisme tetap ada. Khullar (2023) mengusulkan kerangka *feminist foreign policy* yang berakar pada pengalaman komunitas dan advokasi lintas batas, sebagai alternatif terhadap diplomasi negara yang sering kali bersifat eksklusif dan tidak reflektif terhadap kebutuhan perempuan di Global Selatan. Dalam konteks ini, pendekatan *What's the Problem Represented to Be?* (Bacchi, 2009), menjadi relevan untuk membaca bagaimana aktor non-negara mendefinisikan ulang “masalah” gender dalam diplomasi. Mereka tidak hanya menanggapi narasi negara, tetapi juga membentuk wacana baru yang lebih kontekstual dan berbasis pengalaman lokal. Praktik ini menunjukkan bahwa diplomasi publik bukan hanya alat komunikasi negara, tetapi juga arena politik di mana

identitas dan klaim epistemik dinegosiasikan secara aktif.

Indonesia menunjukkan dinamika resistensi yang lebih tersirat, namun tetap signifikan. Komunitas seni, akademisi, dan aktivis perempuan menggunakan diplomasi budaya sebagai medium untuk menyampaikan pesan-pesan kesetaraan dan keberagaman. Inisiatif seperti “Diplomasi Batik Feminis” dan “Festival Perempuan Nusantara” mengangkat narasi perempuan sebagai penjaga pengetahuan lokal dan agen perubahan sosial. Meskipun tidak diakui secara resmi oleh negara, praktik ini menunjukkan bahwa diplomasi publik dapat dijalankan dari bawah sebagai bentuk klaim terhadap ruang representasi. Blanchard (2003) menekankan bahwa pengalaman perempuan dalam keamanan dan hubungan internasional sering kali menjadi sumber pengetahuan alternatif yang lebih kontekstual dan etis dibandingkan narasi negara yang maskulin dan teknokratik. Dalam kerangka *postcolonial feminism*, praktik resistensi ini mencerminkan upaya untuk menggugat dominasi epistemik negara dan membuka ruang bagi pengetahuan alternatif yang selama ini terpinggirkan (Santos, 2018; Strazzeri, 2024). Aktor non-negara tidak hanya menantang narasi negara, tetapi juga membangun legitimasi melalui

pengalaman, advokasi, dan produksi pengetahuan kolektif. Mereka mereimajinasikan diplomasi publik sebagai praktik yang tidak hanya bersifat representasional, tetapi juga transformatif—sebuah arena di mana suara perempuan, terutama dari komunitas yang terpinggirkan, menjadi pusat dari narasi global yang lebih adil dan reflektif.

Gender sebagai *Soft Power* dan Legitimasi

Dalam diplomasi publik negara-negara Global Selatan, gender sering kali digunakan sebagai instrumen *soft power*—alat untuk membangun citra, menarik simpati internasional, dan memperkuat posisi negara dalam arena global. Namun, penggunaan gender sebagai citra diplomatik tidak selalu mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan substantif. Ketegangan antara representasi visual dan kompleksitas sosial menjadi titik kritis dalam membaca praktik diplomasi berbasis gender.

Di Indonesia, citra perempuan sebagai simbol budaya digunakan untuk membangun daya tarik internasional. Kampanye diplomasi publik seperti “*Wonderful Indonesia*” secara konsisten menampilkan perempuan sebagai penari tradisional, pembawa batik, dan figur

keibuan yang merepresentasikan nilai harmoni dan keramahan. Dalam forum internasional seperti “*Expo Dubai 2020*”, paviliun Indonesia menampilkan perempuan sebagai wajah budaya nasional, namun tidak sebagai pembicara atau perumus kebijakan luar negeri. *Webinar* kebijakan yang diselenggarakan oleh ALMI dan CBDS (2025) mengungkap bahwa representasi tersebut tidak diikuti oleh transformasi struktural dalam diplomasi formal. Perempuan tetap jarang hadir sebagai pengambil keputusan dalam kebijakan luar negeri, dan kontribusi diplomatik informal seperti diaspora perempuan belum diakui secara institusional. Dalam kerangka feminist constructivism, hal ini menunjukkan bahwa negara membentuk citra gender untuk konsumsi internasional, namun tidak mengubah norma internal yang menopang ketimpangan (Aggestam & Towns, 2019; Locher & Prügl, 2001).

Afrika Selatan mengusung narasi kesetaraan dan inklusivitas sebagai bagian dari citra diplomatiknya. Salah satu contoh konkret adalah kampanye “*Women in Diplomacy*” yang diluncurkan oleh Department of International Relations and Cooperation (DIRCO) pada 2022, yang menampilkan diplomat perempuan dalam media sosial dan forum internasional.

Negara ini juga aktif dalam mempromosikan Resolusi PBB 1325 tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan, serta menjadi tuan rumah “*African Women Leaders Network*” (AWLN) Summit. Representasi perempuan sebagai pemimpin dan aktivis digunakan untuk memperkuat legitimasi moral negara sebagai pelopor hak asasi manusia di Global Selatan. Namun, laporan dari *Commission for Gender Equality* (2024) menunjukkan bahwa representasi ini belum sepenuhnya tercermin dalam struktur diplomatik formal. Tokenisme masih menjadi tantangan, di mana perempuan ditampilkan sebagai simbol inklusivitas tanpa akses penuh terhadap kekuasaan institusional. Dalam kerangka postcolonial feminism, representasi ini mencerminkan upaya negara untuk merebut kembali narasi dari dominasi epistemik Barat, namun masih dibatasi oleh struktur patriarki yang tersisa (Strazzeri, 2024).

Brasil menghadirkan pendekatan yang lebih berbasis komunitas. Diplomasi publik yang melibatkan perempuan adat dan aktivis lokal tidak hanya membangun citra keberagaman, tetapi juga memperkuat legitimasi negara melalui pengakuan terhadap pengetahuan lokal dan pengalaman komunitas. Contoh konkret adalah partisipasi perempuan dari

komunitas Quilombola dan Amazon dalam kampanye *Diplomacia Cultural Brasileira*, serta keterlibatan mereka dalam forum seperti “*World Social Forum*” dan “*UN Permanent Forum on Indigenous Issues*”. Rodrigues dan Maciel (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam diplomasi komunitas menciptakan narasi yang lebih reflektif dan kontekstual, meskipun belum sepenuhnya diintegrasikan dalam kebijakan resmi. Spies (2019) menekankan bahwa diplomasi berbasis komunitas di Global Selatan memiliki potensi untuk membangun legitimasi yang lebih berakar pada solidaritas dan pengalaman kolektif daripada pada citra institusional.

Ketegangan antara citra dan kompleksitas sosial terlihat jelas dalam ketiga kasus. Negara menggunakan representasi gender untuk membangun legitimasi internasional, namun sering kali gagal mengakui atau mengintegrasikan pengalaman perempuan dalam struktur diplomatik. Dalam konteks ini, representasi gender berfungsi sebagai alat performatif, bukan sebagai refleksi dari transformasi politik yang substantif. Blanchard (2003) mengingatkan bahwa penggunaan gender dalam diplomasi tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan yang menopangnya, dan bahwa representasi

tanpa partisipasi adalah bentuk lain dari eksklusif. Implikasi dari ketegangan ini menyentuh aspek kredibilitas dan keadilan epistemik. Negara yang menggunakan citra gender untuk membangun legitimasi tanpa mengubah struktur kekuasaan berisiko kehilangan kredibilitas di mata komunitas internasional yang semakin kritis terhadap praktik representasi simbolik. Sebaliknya, negara yang membuka ruang bagi partisipasi substantif dan pengakuan epistemik terhadap aktor lokal memiliki peluang untuk membangun diplomasi publik yang lebih adil, reflektif, dan transformatif. Santos (2018) menyebut ini sebagai “epistemologi dari Selatan” sebuah pendekatan yang mengakui pluralitas pengetahuan dan pengalaman sebagai dasar legitimasi politik dan diplomatik.

Dengan demikian, gender dalam diplomasi publik bukan hanya soal citra, tetapi tentang siapa yang memiliki suara, siapa yang diakui sebagai subjek politik, dan bagaimana negara membangun legitimasi melalui narasi yang dipilih. Ketika diplomasi publik berbasis gender hanya berfungsi sebagai alat estetika, ia gagal memenuhi janji transformasi. Namun ketika ia menjadi ruang partisipasi dan pengakuan, ia membuka kemungkinan bagi diplomasi yang lebih adil dan bermakna.

Kesimpulan

Diplomasi publik berbasis gender di Global Selatan memperlihatkan ketegangan antara citra dan kenyataan, antara representasi simbolik dan partisipasi substantif. Negara-negara seperti Indonesia, Afrika Selatan, dan Brasil memanfaatkan citra perempuan sebagai alat soft power untuk membangun legitimasi internasional melalui ikon budaya, narasi inklusivitas, dan keberagaman komunitas. Namun, di balik strategi komunikasi ini, struktur diplomatik formal masih didominasi oleh norma maskulin dan belum sepenuhnya membuka ruang bagi partisipasi perempuan sebagai aktor strategis.

Studi ini menunjukkan bahwa representasi gender dalam diplomasi publik sering kali bersifat performatif: perempuan ditampilkan sebagai wajah negara, tetapi tidak sebagai pengambil keputusan. Ketimpangan ini diperkuat oleh absennya pengakuan terhadap kontribusi diplomatik informal, seperti peran diaspora, komunitas adat, dan aktivis lokal. Dalam konteks ini, pendekatan *feminist constructivism* membantu mengungkap bagaimana negara membentuk citra gender untuk konsumsi global, sementara postcolonial feminism menyoroti bagaimana narasi tersebut sering mengabaikan kompleksitas sosial dan sejarah lokal.

Namun, praktik resistensi dan reimaginasinya dari aktor non-negara membuka kemungkinan baru. Perempuan adat di Brasil, aktivis digital di Afrika Selatan, dan komunitas seni di Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi publik tidak hanya milik negara, tetapi juga ruang kontestasi dan produksi pengetahuan. Mereka membentuk narasi alternatif yang lebih reflektif, kontekstual, dan berakar pada pengalaman kolektif. Implikasi kebijakan dari temuan ini jelas: negara perlu melampaui representasi simbolik dan mengintegrasikan partisipasi perempuan secara struktural dalam diplomasi. Ini mencakup pengakuan terhadap diplomasi komunitas, reformasi institusi diplomatik, pengembangan indikator keadilan epistemik, serta revisi kurikulum pelatihan diplomat dengan perspektif gender dan postkolonial. Hanya dengan pendekatan yang transformatif, diplomasi publik berbasis gender dapat menjadi alat keadilan, bukan sekadar citra.

Daftar Pustaka

- Aggestam, K., & Towns, A. E. (2019). The gender turn in diplomacy: A new research agenda. *International Feminist Journal of Politics*, 21(1), 9–28.
<https://doi.org/10.1080/14616742.2018.1483206>
- Aggestam, K., & Towns, A. E. (Eds.). (2018). *Gendering Diplomacy and International Negotiation*. Springer.
<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-58682-3>
- ALMI & CBDS. (2025). *Webinar Kebijakan Diplomasi Perempuan: Peran dan Tantangan*. Laporan Resmi.
- Angelini, R. (2024). *Deconstructing Gender Inequality in Feminist Foreign Policy: A WPR and Postcolonial Analysis of Canada, Spain, and Germany*. Umeå University, Sweden.
- Ayodele, O., Wekesaa, B., & Turianskyi, Y. (2021). Introduction to the special issue: Digital diplomacy in Africa. *South African Journal of International Affairs*, 28(3), 335–339.
<https://doi.org/10.1080/10220461.2021.1961606>
- Ayodele, T., Wekesaa, T., & Turianskyi, Y. (2021). Digital diplomacy and gender inclusiveness in South Africa. *African Journal of Political Science*, 32(4), 55–71.

- Bacchi, C. (2009). *Analysing Policy: What's the Problem Represented to Be?* Pearson Education Australia. <https://www.ucpress.edu/book/9780520279995>
- Blanchard, E. M. (2003). Gender, international relations, and the development of feminist security theory. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 28(4), 1281–1312. <https://doi.org/10.1086/368328>
- Commission for Gender Equality. (2024). *Annual Report on Gender Representation in Public Institutions*. Pretoria: CGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Department of International Relations and Cooperation (DIRCO). (2022). *Women in Diplomacy Campaign*. Pretoria: Government of South Africa.
- Enloe, C. (2014). *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics* (2nd ed.). University of California Press.
- Expo Dubai Indonesia Pavilion. (2021). *Wonderful Indonesia Cultural Showcase*. Jakarta: Ministry of Tourism and Creative Economy.
- Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (2nd ed.). Routledge. DOI:[10.4324/9781315834368](https://doi.org/10.4324/9781315834368)
- Khullar, A. (2023). Re-envisioning South Asia's Foreign Policy from a Feminist Perspective. In *South Asian Women and International Relations* (pp. 105–131). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-9426-5_7
- Lazar, M. M. (2017). Feminist critical discourse analysis. In J. Flowerdew & J. E. Richardson (Eds.), *The Routledge Handbook of Critical Discourse Studies* (pp. 372–387). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315739342-26>
- Leiden University – HJD Diplomacy Reading List (2024). *Gender in Diplomacy*.

- Locher, B., & Prügl, E. (2001). Feminism and constructivism: Worlds apart or sharing the middle ground? *International Studies Quarterly*, 45(1), 111–129.
<https://doi.org/10.1111/0020-8833.00184>
- Meredith, M. (2024). *Universities and Epistemic Justice in a Plural World: Knowing Better*. Springer.
<https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-99-9852-4>
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. PublicAffairs.
<https://www.publicaffairsbooks.com/titles/joseph-s-nye-jr/soft-power/9781586483067/>
- Rodrigues, A., & Maciel, M. (2023). Indigenous women and community diplomacy in Brazil: Challenges and opportunities. *Revista Brasileira de Política Internacional*, 66(2), 102–118.
<https://www.scielo.br/j/rbpi/>
- Rodrigues, G. M. A., & Maciel, T. M. (2023). Heritage Diplomacy Matters? Brazil's Foreign Policy and South–South Cooperation in Cultural Heritage. In *Soft Power and Heritage* (pp. 113–136). Springer.
- Santos, B. de S. (2018). *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*. Routledge.
- Spies, Y. K. (2019). *Global South Perspectives on Diplomacy*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-00530-6>
- Stephenson, E., & Rathore, K. S. (Eds.). (2025). *Gender and Diplomacy: Critical Junctures, Innovations and Future Research Directions*. Springer.
<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-83064-8>
- Strazzeri, I. (2024). Gender and postcolonial studies: History of the concept and debate. *Frontiers in Sociology*, 9, Article 1414033.
<https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1414033>
- Sukma, R. (2011). Soft Power and Public Diplomacy: The Case of Indonesia. In S. J. Lee & J. Melissen (Eds.), *Public Diplomacy and Soft Power in East Asia* (pp. 91–112). Palgrave Macmillan.

https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/9780230118447_6.pdf

Tickner, J. A. (1992). *Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security*. Columbia University Press.

<https://cup.columbia.edu/book/gender-in-international-relations/9780231075398>

UN Women. (2023). *Feminist Foreign Policy: A Global Overview*. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/06/feminist-foreign-policy-global-overview>

Wodak, R. (2015). Critical discourse analysis, discourse-historical approach. In D. Tannen, H. E. Hamilton, & D. Schiffrin (Eds.), *The Handbook of Discourse Analysis* (2nd ed., pp. 538–561). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118584194>

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage Publications.